

Papua: Rekaman dan Refleksi April (16-30 April 2020)

1. Suatu Yayasan Inggris yang memberikan perhatian khusus kepada para tahanan politik, *Tapol*, bersama dua pengacara HAM bernama, Jennifer Robinson dan Veronica Koman, mengirim 'desakan 63 tahanan politik' (*Tapol*) kepada Gugus Kerja Penahanan Sewenang-wenang dan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)¹. Mereka, dua pengacara bersama *Tapol*, diminta oleh 63 *tapol* untuk membawa kasus mereka ke PBB dan minta supaya mereka dibebaskan tanpa syarat. Para *Tapol* ini terdiri dari 56 orang asli Papua, satu orang non-Papua Indonesia, lima orang Maluku, dan satu orang kewarganegaraan Polandia. Sebagian besar dari mereka masih menunggu disidangkan. Sedangkan, tujuh orang telah divonis dan lainnya sedang menjalankan proses di persidangan. Secara khusus pada saat ini keselamatan jiwa tahanan terancam karena ditahan dalam penjara yang melebihi kapasitas di tengah pandemi di Indonesia.
2. Banyaknya 'insiden penembakan' di sekitar wilayah operasional PT Freeport akhir-akhir ini mendorong KontraS (Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan) meminta Pemerintah menyusun sebuah Tim Independen guna menginvestigasi penembakan dua orang sipil di Mimika tanggal 13 April. Juga Amnesty Internasional Indonesia turut mengangkat suaranya². Yang ditembak mati oleh anggota TNI adalah dua warga sipil, Eden Armando Bebari (19 tahun) dan Ronny Wandik (23 tahun) di Mile 34 wilayah PT Freeport³. [Insiden ini kami telah mencatat dalam laporan sebelumnya, 1-15 April, 2020].
3. Dalam perkembangan selanjutnya Direktur Lembaga Bantuan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, mendesak Pimpinan KomNas HAM menonaktifkan Kepala Perwakilan KomNas HAM di Papua, Frits Ramandey, yang dinilai merendahkan martabat serta merendahkan HAM tentang korban penembakan di kali Kabur Mile 34 Tembagapura Timika⁴. Walau belum ada langkah awal suatu investigasi oleh pihak yang berwenang seperti KomNas HAM, menurut penilaian Bp Christian, pernyataan Frits Ramandey cenderung menggiring opini publik bahwa kasus tersebut semata-mata adalah kecerobohan aparat di lapangan yang bisa dibawa dan diadili di pengadilan Militer sebagai pidana semata-mata. Padahal kasus tersebut sudah jelas adalah terindikasi kuat sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crime against humanity*), suatu pelanggaran HAM berat.
4. Covid-19 makin meluas di Propinsi Papua. Sekarang juga Kabupaten Nabire muncul dengan 3 kasus positif. Gambaran selengkapnya pada tanggal 17 April 2020: Kasus Positif 89, Sembuh 19, Meninggal 7, ODP 3.532, PDP 101, Tes PCR 390⁵.

COVID-19 13 APRIL 2020	JUMLAH POSITIF	JUMLAH DIRAWAT	JUMLAH SEMBUH	JUMLAH MENINGGAL
Kab Jayapura	17	12	4	1
Kota Jayapura	26	16	7	3
Kab Merauke	9	5	4	-
Kab Mimika	24	17	4	3
Kab Sarmi	3	3	-	-
Kab Keerom	4	4	-	-

¹Lihat Tempo.co, 16 April 2020, Desak PBB, 63 tahanan politik minta dibebaskan tanpa syarat

²Lihat <https://www.nasional.kompas.com> 17/4/2020 Amnesty Ingatkan soal Pemenuhan Hak Keluarga 2 Korban Penembakan di Papua
³Lihat <https://www.nasional.kompas.com> 17/4/2020 Amnesty Ingatkan soal Pemenuhan Hak Keluarga 2 Korban Penembakan di Papua

³Lihat <https://www.indoleft.org/news/2020-04-18/rights-group-calls-for-independent-investigation-into-tni-shootings-in-papua.html>

⁴Lihat Papua No. 1 News Portal / jubi.co.id 21 April 2020

⁵ Info Grafis Covid-19 Update 17 April 2020 Propinsi Papua; lihat <https://www.bogopapua.com/tiga-pasien-positif-covid-19-di-nabire-berasal-dari-klaster-gowa/>

Kab Jayawijaya	2	2	-	-
Kab Memberamo Tengah	1	1	-	-
Kab Nabire	3	3	-	-
Total	89	63	19	7
<i>Orang dalam Pemantauan (ODP)</i>	3.532	<i>Orang dalam Pengawasan (PDP)</i>	101	<i>Tes PCR</i> 390

Berhubungan dengan perkembangan diatas ini Nabire sudah memutuskan untuk berlakukan tanggap darurat covid-19⁶, sedangkan RSUD Nabire menyatakan kekurangan APD (alat perlindungan diri) tangani pasien Covid-19. Sementara para Bupati Wilayah Meepago memutuskan untuk tetap membatasi segala prasarana pengangkutan di wilayah sampai 6 Mei mendatang. Wilayah Meepago terdiri dari Kab Dogiyai, Kab Deiyai, Kab Nabire, Kabupaten Paniai dan Kab Intan Jaya. Sebaliknya Bupati Mimika minta akses penerbangan dibuka, khusus untuk penumpang, setelah ditutup sejak beberapa minggu⁷. Kebijakan ini agak membingungkan, mengingat bahwa jumlah pasien di wilayah itu naik secara signifikan dan puncaknya akan dinantikan sekitar akhir april⁸. Menurut PemKab permintaan Bupati ada kaitan khusus dengan mereka yang masih diluar daerah dan mau pulang, termasuk pejabat; mereka mesti memiliki KTP Mimika. Sudah tentu keterangan ini tidak menghilangkan kekawatiran bahwa dengan kebijakan ini penerbangan akan pelahan-lahan berjalan seperti biasa saja. Apakah PemKab/Bupati pernah membahas kebijakan ini di kalangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (ForKoPimDa) yang telah menetapkan penutupan prasarana bandara, kecuali untuk pengangkutan barang?

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Covid No. 1, 2020 akan digugat⁹. Perppu ini menyangkut Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Sejumlah tokoh, termasuk Amien Rais (mantan Ketua MRP RI), Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia), Malam Sambat Kaban (mantan Menteri Kehutanan), Sri Edi Swasono (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Indonesia) , didukung oleh beberapa Yayasan, a.l. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menggugat Perppu Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Inti kritik mereka: Perppu ini memberikan kewenangan kepada pejabat eksekutif –termasuk impunitas- untuk menentukan kebijakan keuangan (a.l. penentuan batas deficit anggaran di atas 3% tanpa mengatur batas maksimalnya) sampai tahun 2022. Kebijakan ini dapat ditetapkan tanpa persetujuan lebih dulu oleh DPR RI. Menurut para penggugat kewenangan demikian bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.
6. Sidang pertama MK dijalankan pada tanggal 28/4/2020; para penggugat memperjelas alasan-alasan penggugatannya. Menanggapi masukan itu Majelis Hakim MK memberikan saran kepada para penggugat untuk melengkapi permohonannya dengan bahan bandingan dengan Negara lain yang menangani Covid-19; apakah mereka juga memakai semacam Perppu dan berhasil mengatasi Covid-19, atau tidak ada dan tetap berhasil? Atau cara lainnya. Para penggugat diberikan 14 hari untuk melengkapi permohonan penggugatan itu¹⁰.
7. Weekend 18-19 April terjadi bentrokan antar warga di Sentani. Bentrokan antara kampung terjadi antara Kampung Toware dan Kampung Kehiran, Distrik Sentani, karena Kepala Kampung Kehiran dipukul oleh oknum pemuda dari Kampung Toware, malam minggu (18/4/2020). Ternyata pemukulan itu ada kaitan dengan soal tanah yang sudah lama ada, menyangkut kedua kampung itu. Pada hari Minggu, walau kedua kampung disiaga oleh polisi, Kampung Kehiran membalas pemukulan

⁶Lihat <https://jubi.co.id/nabire-berlakukan-tanggap-darurat-covid-19/> 17 April 2020

⁷Lihat <https://www.seputarpapua.com/view/pemkab-buka-penerbangan-khusus-untuk-warga-mimika-di-luar-daerah> 17/4/2020

⁸Lihat <https://www.sepitarpapua.com/view/jubir-puncak-penyebaran-covid-19-di-mimika-diprediksi-pekan-depan> 19/4/2020

⁹Lihat <https://www.fokus.tempo.co/amp/1333164/waspada-jebakan-batman-di-balik-perpu-covid-19> 19 April 2020

¹⁰Lihat Kompas.com App 29 April 2020

itu dengan membakar sejumlah rumah di Kampung Toware. Juga enam (6) orang terluka. Esok harinya, 20/4/2020, salah satu dari antara yang terluka meninggal dunia karena ditikam senjata tajam. Akhirnya TNI-Polisi berhasil menenangkan masyarakat dan mengadakan pengawasan ketat selanjutnya guna menghindari 'balas dendam' lagi¹¹.

8. Kekacauan terjadi di Manokwari tanggal 22 April. Hal ini terjadi karena ada berita bahwa 13 pasien yang dikarantina di RS Papua Barat, terletak dalam bagian kota elit Manokwari, mau dipindahkan ke salah satu bagian kota lainnya, yakni Andai, Manokwari Selatan. Mendengar berita itu masyarakat memalang ruas jalan di depan RS Papua Barat itu dan menuntut supaya 13 pasien tetap di rumah sakit itu¹².
9. Suatu operasi aparat gabungan TNI/Polisi sedang berjalan di beberapa kampung di distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat (Papua Barat). Sejak 15 April sampai dengan 23 April sejumlah anggota satuan Brimob mengadakan pemeriksaan/sweeping di sejumlah kampung di wilayah Maybrat. Ternyata aksi ini ada kaitan dengan pembunuhan terhadap seorang Brimob yang bertugas untuk keamanan suatu perusahaan di Kab Bintuni. Pelaku pembunuhan melarikan diri sambil membawa senjata serta amunisi dari anggota Brimob yang dibunuh. Ternyata selama aksi ini salah satu sasaran khusus dari aparat gabungan itu adalah KNPB. Kenapa? Kenyataannya adalah bahwa KNPB selama ini tidak mengadakan atau merencanakan kegiatan apapun¹³. Beberapa orang ditangkap (termasuk seorang kepala kampung dan seorang unsur pimpinan KNPB setempat) dan setelah disiksa/dianiaya berat sejumlah orang dilepaskan lagi. Saat ini, 23/4/2020, empat orang sedang ditahan di Polres Sorong Selatan. Keempat orang ini adalah: Pontius Wakom (anggota satpol PP Kb Maybrat), Yakob Asem (simpatisan KNPB), Simon Sasior (Kepala Kampung) dan Marthen Muuk (Kepala Kampung). Di beberapa kampung warga memilih untuk mengungsi karena takut dan belum kembali ke kampungnya; kantor KNPB Maybrat dihancurkan dan sejumlah rumah yang berhiasan Bintang Kejora dirusak dan/atau dibakar habis¹⁴. Berhubungan dengan catatan diatas ini tidak mengherankan lagi bahwa mahasiswa Maybrat mengangkat suaranya dengan menolak pendirian KODIM di Kabupaten Maybrat. Alasannya: mereka masih trauma dengan segala macam operasi militer selama ini yang penuh kekerasan. Apalagi wilayah ini dinilai sangat aman, dan kehadiran militer hanya akan memicu konflik dan penderitaan. Lebih penting bahwa daerah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Militer tidak dibutuhkan. Tambah lagi wilayah Kab Maybrat adalah resmi 'wilayah adat dan konservasi', maka jangan diganggu dengan segala macam kegiatan yang tidak sesuai dengan status konservasi ini¹⁵. Yang juga tidak lepas dari operasi militer diatas juga adalah suatu siaran pers oleh *Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Lingkungan*, dimana diterangkan bahwa suatu perusahaan pembalakan kayu, PT Wanagakang Utama, mulai penebangan di wilayah adat yang berada di Dusun Aisnak, distrik Aifat Timur Selatan Jauh, Kab Maybrat, hingga ke distrik Moskona Selatan, Kab Teluk Bintuni. Masyarakat memprotes kegiatan perusahaan itu karena belum ada kesepakatan dengan masyarakat setempat, termasuk komposisi harga kayu dibawah standar¹⁶. Dicatat juga bahwa di wilayah yang sama sedang diadakan suatu operasi militer yang sangat meresahkan masyarakat di wilayah ini (lihat catatan di atas). Siaran Pers ini diakhiri dengan menyeru kepada baik Pimpinan Propinsi dan Kabupaten maupun Pimpinan TNI/Polisi untuk menghargai dan melindungi hak masyarakat setempat, menghentikan segala bentuk operasi intimidasi, kekerasan serta

¹¹Lihat <https://seputarpapua.com/view/bentrok-warga-di-sentani-enam-terluka-dan-sejumlah-rumah-terbakar/> 19/4/2020

¹²Lihat <https://kongkrit.com/buntut-pemalagan-ruas-jalan-di-manokwari-karena-informasi-yang-bocor-dari-rs-papua-barat> 22 April, 2020

¹³Lihat <https://www.jagatpapua.com/polda-ungkap-motif-pembunuhan-brimob-dan-fakta-penyisiran-di-maybrat/> 28 April 2020

¹⁴Lihat <https://suarapapua.com/2020/04/26/dunia-sibuk-corona-apart-sibuk-tangkap-dan-teror-masyarakat-di-maybrat/>

¹⁵Lihat <https://jubi.co.id/ikatan-mahasiswa-tambrau-w-tolak-rencana-pendirian-kodim/> 28 April, 2020

¹⁶Lihat <https://pusaka.or.id/en/2020/04/press-release-protect-the-rights-of-the-moskona-people-in-pt-wanagalang-utamas-concession-area-a-fact-finding-team-should-be-formed/> 29/4/2020

perusakan lingkungan dan mengupayakan penyelesaian hukum kasus kekerasan dengan adanya perusahaan PT Wanagakang Utama¹⁷.

10. Perserikatan buruh serta organisasi perdagangan di Indonesia (KSPI – *Konfederasi Satuan Perdagangan Indonesia* - dan MPBI – *Majelis Perserikatan Buruh Indonesia* - merencanakan suatu demo massal untuk 30 April 2020. Aksi ini bermaksud memprotes *Omnibus Law* (UU Cipta Kerja) yang sedang dibahas di DPR, sedangkan mereka sudah meminta dengan sangat supaya tidak dibahas selama 'kita semua sibuk dengan Covid-19'. Ternyata DPR toh mulai membahasnya; kenyataan itu juga tidak sesuai dengan janji Ketua DPR beberapa minggu lalu. Dengan demikian kesan kuat bahwa DPR ingin membahas *Omnibus Law/RUU Cipta Kerja* yang berdampak besar pada masyarakat nanti tanpa memungkinkan masyarakat untuk turut bersuara. Gaya kerja DPR ini sangat diprotes dan walau Polisi tidak mau mengeluarkan izin demo yang direncanakan, para perencana aksi ini sangat nekad untuk menjalankan demonya¹⁸. Ternyata *Fraksi Rakyat Indonesia* (FRI), melalui anggotanya Asfinawati, mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan *Omnibus Law*, dan berfokus pada pemantauan bagaimana pemerintah menangani pandemi Covid-19. Sampai saat ini, menurut Asfinawati, yang juga Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), peranan serta fungsi DPR berkaitan dengan penanganan Covid-19 kurang berjalan¹⁹. Perwakilan Agama tidak kalah mulai meningkatkan suaranya. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), M Maksud Machfoedz, menyebut *RUU Omnibus Law Cipta Kerja* yang saat ini tengah dalam pembahasan DPR penuh dengan kezaliman (ketidakadilan) terhadap rakyat kecil. Maka: pembahasan RUU tersebut seharusnya dihentikan. Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqqudas mengatakan "kalau kami semua sekarang ormas agama sudah hadir dan memberikan pandangan, sebaiknya pemerintah dengan jiwa besar, menarik kembali naskah itu". Sementara Koordinator Komisi Hukum Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Johny Simanjuntak meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan, karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia²⁰. Ternyata Presiden Jokowi (24/04/2020) ingin supaya jadwal pembahasan berjalan seperti direncanakan, maka naskah tidak akan ditarik, namun 'klaster RUU Cipta Kerja' dibahas sebagai klaster yang terakhir, maka pembahasan klaster itu ditunda dulu. KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, tidak setuju dan sangat kecewa karena isi klaster "RUU Cipta Kerja" ada kaitan dengan sejumlah klaster lainnya²¹. Konflik intern pemerintah ada di depan pintukah?
11. Apakah suatu industri baru, yakni pertambangan batu-bata, sedangkan direncanakan dilaksanakan di Papua? Sejarah perampasan tanah dan penghancuran lingkungan akan terulangkah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengingat tiga fakta ssb: [a] di Indonesia suatu industri luas dan yang kurang dikendalikan, yakni pertambangan batu-bata, menghasilkan banyak keuntungan untuk para investor, namun meninggalkan masyarakat menghadapi dampaknya penghancuran lingkungan alamnya. [b] Wilayah Papua memiliki beberapa area batu-bata yang belum dieksplorasi, namun pemerintah pusat sedang mengerjakan rencana untuk membuka pertambangan batu-bata di Papua. [c] Suatu investigasi berkaitan dengan industri batu-bata di Horna, Kabupaten Teluk Bintuni²², salah satu wilayah di Kepala Burung (Papua Barat) menunjukkan bahwa ada perusahaan – PT Horna Inti Mandiri - yang telah memperoleh izin beroperasi di wilayah itu dan ternyata perusahaan itu mempunyai koneksi dekat dengan pemain kekuasaan lokal maupun nasional²³.

¹⁷ Lihat <https://jagapapua.com/article/detail/2570/dinilai-langgar-keadilan-aktifitas-pt-wanagakang-utama-dikecam> 29 April, 2020

¹⁸ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419161124-32-495023/buruh-akan-gelar-aksi-may-day-di-masa-corona>

¹⁹ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200414145818-32-49345/fraksi-rakyat-desak-dpr-setop-bahas-ruu-cipta-kerja>

²⁰ Lihat <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2020>. PBNU: Omnibus Law Ciptaker Sarat Kezaliman, 28/04/2020 nasiona

²¹ Lihat Kompas.com News Nasional Maxstream, Kamis, 30 April 2020

²² Selama penajahan Belanda Bintuni disebutkan Steenkool, artinya batu-bata.

²³ Lihat <https://news.mongabay.com/2020/04/on-the-brink-of-a-coal-boom-papuans-ask-who-will-benefit/>

12. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dibawah pimpinan Wakil Gubernur, Klemen Tinal, memutuskan untuk memperpanjang PSBB buat propinsi Papua sampai tanggal 6 Mei. Alasannya jelas: jumlah pasien Covid-17 makin hari makin naik. Sementara waktu perlu dicatat bahwa PemKab Timika telah mengizinkan Garuda untuk terbang sekali-kali dan flight pertama yang membawa 106 penumpang mendarat di Timika 21 April. Kebijakan ini bertabrakan dengan kebijakan Bupati-Bupati lainnya di propinsi Papua dan Wakil Gubernur menyatakan protesnya dengan jelas²⁴. Apalagi menurut juru bicara Penanggulangan Covid-19 Mimika, Reynold Ubra, transmisi lokal penyebaran Covid-19 terjadi di Tembagapura, wilayah operasional tambang PT Freeprt Indonesia.²⁵
13. Ada himbauan supaya Indonesia (TNI-Polri) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyepakati gencatan senjata selama 'masa Covid-19' sehingga fokus penuh pada perlawanan virus itu. Meng Sekretaris Jenderal PPB sudah pernah menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam 'berperangan' supaya suatu "gencatan senjata global" diterapkan. "Sudah waktunya menempatkan konflik bersenjata di akhir dan fokus bersama berjuang demi kehidupan bersama", seruannya. Ajakan itu juga pernah diangkat oleh pimpinan TPNPB yang menyetujui gencatan senjata itu. Dalam reaksi pertamanya, Sebby Sambom, juru bicara TPNPB, menyatakan setuju dan sekaligus berharap bahwa pasukan non-organik ditarik dari Papua. Menurut akademisi (LIPI) yang mengeluti isu Papua, Adriana Elizabeth, gencatan senjata memang semestinya dipikirkan kedua belah pihak. Dia juga mengingat Jokowi akan rencananya tahun lalu untuk siap bertemu dengan orang-orang pro-kemerdekaan. Sebaiknya perundingan ini tetap diadakan dan pelaksanaannya dipercepat, sarannya. Namun, sampai sekarang, pemerintahan Jokowi belum membuat pernyataan apa pun soal tawaran gencatan senjata²⁶.
14. Akhirnya (21/4/2020) Presiden melarang dengan resmi mudik lebaran 2020, mulai berlaku tgl 24 April. Maka, bukan gaya penghimbauan lagi; sekarang dilarang dengan jelas untuk umum, di semua daerah dimana ada Covid-19. Sudah 900.000 'curi start' sebelum larangan resmi keluar. Dalam tayangan acara *Mata Najwa* (22/4/2020) bisa mendengar bahwa sekali lagi ada hal yang membingungkan. Sewaktu Jokowi ditanya oleh Najwa, kenapa sudah mengizinkan sekian banyak orang untuk mudik (maksud; sekitar 900.000 yang sudah 'curi start') Jokowi menyatakan: "itu bukan mudik namun 'pulang kampung'". Waktu ditanya lanjut: bedanya apa antara 'mudik' dan 'pulang kampung' Jokowi terkekeh saja²⁷.
15. Kesannya bahwa di pusat pemerintahan masih tetap ada kekacauan sekitar kebijakan mana mau diberlakukan. Baik itu antara kementerian maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya seperti soal KRL (kereta api) yang sempat diminta 5 kepala daerah untuk dihentikan tetapi Kemenhub menolak permintaan itu. Kedengaran Jokowi juga mulai merasa terganggu dengan suasana demikian. Beliau mengakui memang masih adanya ego-sektoral dari masing-masing pihak yang tidak saling memberikan solusi. De facto Jokowi mendukung Plt Menhub, Luhut Panjaitan²⁸. Masyarakat tinggal berteka-teki.
16. Memang sudah dinantikan, namun tidak diharapkan: kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Ternyata di pasar sentral di Timika sehari menjelang Bulan Ramadan bahan pokok mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti harga cabai rawit dari Rp 60 ribu/kg naik menjadi Rp 80 ribu/kg; bawang merah dari harga Rp 50 ribu/kg menjadi Rp 60 ribu/kg. sayur terong yang lazimnya Rp 2 ribu jadi Rp 10 ribu/kg; buncis yang sebelumnya Rp 25 ribu/kg menjadi Rp 35 ribu/kg²⁹. Kenaikan

²⁴Lihat <https://seputarpapua.com/view/klemen-tinal-mimika-harus-patuhi-aturan-soal-penerbangan-penumpang> Rabu, 22 April 2020

²⁵Lihat <https://seputarpapua.com/view/reynold-ubra-penyebaran-covid-19-di-tembagapura-mengkhawatirkan> 23/4/2020

²⁶Lihat <https://www.tirto.id/fokus-covid-19-indonesia-opm-semestinya-sepakati-gencatan-senjata> 21 April 2020

²⁷Lihat <https://www.wartakota.tribunnews.com/22-4-2020/> Najwa Shihab Ungkap Pemerintah Kecolongan Banyak Orang Mudik, Jokowi: Itu Pulang Kampung

²⁸Lihat <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/04/23/>

²⁹Lihat seputarpapua.com/ 23/4/2020

semacam ini memang disesali dan pertanyaan adalah kenapa kenaikan harga tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang berwajib????

17. Akhirnya, 24/4/2020, enam tahanan politik Papua di Jakarta (termasuk seorang non-Papua, Surya Anta) divonis. Lima di antara mereka divonis 9 bulan; satu, Isay Wenda, diberikan vonis 8 bulan. Mereka semua sudah 8 bulan di penjara, maka satu langsung bebas sedangkan yang lain masih perlu tinggal dipenjara selama satu bulan. Diukur dari ringannya vonis dapat disimpulkan bahwa panel hakim juga tidak terlalu yakin bahwa para tahanan sebenarnya melawan hukum sewaktu menjalankan protes damai akhir Agustus 2019 didepan istana Presiden. Amnesty International Indonesia menyesal bahwa panel hakim tidak berani memvonis mereka 'tidak salah dan bebas tanpa syarat'³⁰. TAPOL (London) menanggapi vonis ini dengan meminta supaya semua langsung dibebaskan, karena para tahanan di penjara masih terus terancam hidupnya karena 'zamen Covid-19'.³¹
18. Pada hari Jumaat, 24/4/2020, sekali lagi terjadi penembakan di wilayah operasional PT Freeport. Kali ini 3 kendaraan Freeport ditembaki di Mile 60. Tidak ada yang terluka, hanya kerusakan sedikit kendaraannya. Fraksi TPNPB mengklaim bertanggungjawab atas penembakan ini³².
19. Gerakan protes di Indonesia mulai meningkat. Bukan saja Perserikatan Buruh yang berniat untuk mengadakan demo; bukan saja sejumlah pribadi orang mengemukakan tanggapannya terhadap kebijakan pemerintah berhubungan dengan Covid-19; juga di kalangan mahasiswa dan fraksi politik muncul kegiatan protes. Salah satu adalah Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) bergabung dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk mendesak Polri segera menghentikan terror terhadap masyarakat. FRI mencatat sejak Feb 2020 terjadi beberapa pola untuk memberangus suara ktirits publik. Empat pola dipakai, yakni: intimidasi, peretasan, kriminalisasi dan pengawasan. Menurut FRI tindakan Polri tersebut menunjukkan kemunduran demokrasi. Aktifis FRI, Wahyu A. Perdana, mengatakan kalau itu intimidasi terhadap gerakan yang menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law sampai protes terhadap penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Maka, pemerintah mesti mengevaluasi dengan segera Polri dan pihak-pihak yang seharusnya menjaga keamanan masyarakat. Beberapa contoh nyata diberikan, a.l. korban peretasan akun, seperti Fajar (Ketua BEM UI), contoh kriminalisasi menimpa pegiat Aksi Kamisan Malang, peneliti independen kebijakan publik, Ravoio Patra; pengawasan aktivitas oleh Polri dan orang tak dikenal dialami Solidaritas Pangan Yogyakarta dan LBH Medan³³.
20. Update Covid-19 di Papua 30 April 2020: Kasus Positif 205, Perawatan 141, Sembuh 57, Meninggal 7, PDP 270, ODP 1.827, Tes PCR 981³⁴.

COVID-19 24 APRIL 2020	JUMLAH POSITIF	JUMLAH DIRAWAT	JUMLAH SEMBUH	JUMLAH MENINGGAL
Kab Mimika	64	50	11	3
Kota Jayapura	44	21	20	3
Kab Jayapura	36	25	10	1
Kab Nabire	16	16	-	-
Kab Merauke	13	5	8	-
Kab Keerom	10	8	2	-
Kab Biak Numfor	9	9	-	-
Kab Sarmi	4	1	3	-
Kab Jayawijaya	3	1	2	-
Kab Memberamo Tengah	2	1	1	-

³⁰Lihat <https://www.jakartapost.com/news/2020/04/24/court-finds-activists-guilty-of-treason-for-holding-papuan-self-determination-protest.html> dan ETAN fbp@igc.org 1 mei 2020; ETAN Condemns Violence and Racism Against West Pauans. Calls for freeing Papuan Political Prisoners

³¹Lihat Statement TAPOL, London, 24 April – TAPOL denounces sentences handed to Jakarta six.

³²Seputarpapua.com/TPNPB: penembakan kendaraan Freeport di Mile 60 dipimpin Lelambua Waker Senin, 25 April 2020

³³Lihat TEMP.CO Fraksi Rakyat Indonesia sebut Polri menteror rakyat. 26 April 2020

³⁴Lihat <https://seputarpapua.com/> 30 April 2020 – dan *Info Grafis Perkembangan Covid-19* 29 April 2020

Kab Boven Digoel	2	2	-	-
Superiori	2	2	-	-
Total	205	141	57	7
Orang dalam Pemantauan (ODP)	1.827	Orang dalam Pengawasan (PDP)	270	Tes PCR 981

Perkembangan di Papua terkait Covid-19 untuk sebagian masih teka-teki. Memang ada data/angka yang setiap hari diumumkan; data itu hanya di Provinsi Papua. Di Provinsi Papua Barat ternyata virus baru mulai muncul aktif; sekitar 35 kasus di Papua Barat. Maka, dalam uraian ini kami sebenarnya hanya fokus pada data Provinsi Papua saja. Yang paling menonjol adalah bahwa –syukurlah- jumlah kematian relatif kecil. Sejak 13 April tidak naik lagi, tetap 7 saja; sedangkan jumlah orang sembuh naik secara sangat signifikan, dari 19 menjadi 57, berarti naik 200% sebanding dengan jumlahnya tanggal 13 April. Juga jumlah perawatan dan jumlah dinyatakan ‘positif’ naik secara signifikan yakni sekitar 130% sebanding 13 April. Berarti lebih dari dua kali lipat dalam 17 hari terakhir ini. Wilayah yang paling terserang virus ini adalah Kabupaten Mimika. Berhubungan dengan itu juga penting untuk dicatat bahwa ketika ada ‘tes cepat massal’ yang diadakan di Timika tgl 25-26 April, ternyata 110 dari 300 yang dites dinyatakan ‘positif’. Hasilnya masih perlu dibenarkan setelah pemeriksaan tambahan sebagian tes itu di laboratorium di Jayapura³⁵. Namun indikasi awal ini sangat memprihatinkan. Apalagi sewaktu mendengar bahwa di kompleks PT Freeport (Tembagapura) ada 85 orang yang dites positif, sedangkan operasi pertambangan masih berjalan seperti biasa. Baik Bupati maupun pimpinan Freeport mengakui bahwa tidak ada fasilitas secukupnya untuk mengisolasi para pribadi orang yang ‘dinyatakan positif’. Dalam konteks ini juga cukup membingungkan bahwa Bupati meminta supaya penerbangan penumpang ke Timika dibuka, biar secara terbatas frekwensinya. Hasil tes di Timika menggarisbawahi pernyataan dari dr. Silvanus Sumule bahwa sambil membaca segala angka mengenai Covid-19 di Papua kita perlu mengingat bahwa jumlah tes sampai saat ini masih sangat terbatas. Sampai dengan 29 April hanya 981 tes diadakan. Mendengar hasil ‘tes massal’ seperti di Timika, kita semua kaget bahwa ternyata 37% dari jumlah yang dites telah dinyatakan positif. Artinya: gambaran angka sampai saat ini hanya memperlihatkan suatu ‘puncak gunung es’. Dibawah puncak itu kami belum tahu berapa banyak tersembunyi tetapi sudah tentu kemungkinan besar kita semua akan kaget mengenai jumlah orang yang sebenarnya sudah berurusan serius dengan Covid-19. Sekaligus kita sadar Papua sama sekali tidak siap menangani musibah sebesar itu, mengingat sangat miskinnya infrastruktur medis. Dalam salah satu video-info awal Dr Silvanus Sumule menyatakan bahwa di seluruh Papua hanya ada 7 dokter paru-paru dan hanya ada 60 ventilator, maka mau apa? Juga ‘alat perlindungan diri’ (APD) sangat kurang dimana-mana, hingga para tenaga medis menaruh nyawanya sesaat melayani para pasien Covid-19. Beliau sampai menyatakan bahwa *“kalau mau hidup, sebaiknya jangan datang ke Papua”*. Ungkapan semacam ini memang kurang enak kedengarannya. Namun maksud dan tujuan dr. Silvanus hanya satu saja: ***“Tolong sadar bahwa kita menghadapi suatu ancaman yang sangat berpotensi mematikan, maka tolong semua mengambil bagian dalam perlawanan virus ini. Antara lain dengan mengikuti nasihat-nasihat praktis serta peraturan-peraturan yang akan ditetapkan.”***

³⁵Lihat <https://en.antaranews.com/news/146944/over-hundred-officials-in-papua-test-positive-for-coronavirus> dan seputarpapua.com/view/110-orang-di-mimika-positif-covid-19-setelah-ikuti-rapid-test 27/04/2020

Suatu gambaran yang cukup jelas mengenai keadaan di Papua diberikan secara singkat dalam pemberitaan di Jakarta Post³⁶ (dalam Bahasa Inggris). Juga LIPI mencatat kerentanan Orang Asli Papua dengan menempatkan ancaman Covid-19 di dalam konteks sosial (kesehatan), budaya dan politik (konflik) Papua dewasa ini³⁷. Dengan informasi publik semacam ini diharapkan juga pemerintah pusat akan mulai memberikan perhatian yang lebih nyata pada daerah. Sampai saat ini semua perhatian berkisar 'Jakarta' dan isu nasional seperti 'mudik'. Perhatian ke arah daerah masih kurang terasa karena sampai saat ini 'perhatian pusat' lebih bersifat 'menolak kebijakan setempat' daripada turut memikirkan suatu solusi khusus yang tepat untuk masing-masing daerah, a.l. Papua.

Sementara pimpinan daerah/provinsi mengambil sejumlah tindakan. Kurang diketahui unsur-unsur pertimbangan yang melatarbelakangi segala kebijakan, dan sejauh mana ditetapkan berdasarkan data yang lengkap. Kesan bahwa kebijakan lebih merupakan suatu 'tiruan' kebijakan ditempat lain di Indonesia daripada suatu penetapan kebijakan berdasarkan uraian yang teliti mengenai situasi khas Papua. Mungkin juga kenyataan tidak tersedianya cukup banyak keahlian untuk menilai situasi ancaman kompleks ini dengan lebih saksama, maka 'tiruan sementara' juga bisa diterima sebagai tindakan tepat dan baik karena sekurang-kurangnya dapat membantu untuk membatasi penyaluran virus secara nyata. Pertanyaan muncul juga sejauh mana ada koordinasi yang mengikat secara internal antara kabupaten? Contoh saja, kebijakan di Kabupaten Mimika yang tidak sejalan dengan keputusan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan/atau, bedanya kebijakan Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura. Jelas bahwa kekurangan koordinasi intern tidak menguntungkan kita semua.

Akhirnya penting pun untuk melihat sejauh mana peraturan/kebijakan khusus dipatuhi oleh masyarakat. Sejak 22 Maret 2020 PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) sudah berlaku di Jayapura. Walau demikian Kota Jayapura masih cukup ramai lalu lintasnya. Di sekitar kediaman kami perdagangan di pinggir jalan masih berjalan terus, orang kumpul dan anak-anak masih main bebas dimana saja. Tukang sayur bermotor masih setiap hari muncul dan bergaul dengan para ibu yang membutuhkan sayur. Ibadah di gereja pada hari minggu masih berjalan hingga jemaat berkumpul. Pemakaian 'masker' belum menjadi kebiasaan sama sekali. Menjadi kurang jelas sejauh mana masyarakat betul sadar mengenai keadaan serta ancaman terkait. Ada tetangga yang bilang 'virus tidak dapat kena kami, kami kebal'. Pendapat demikian tidak membantu memberikan motivasi untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan. Kegiatan penyuluhan sangat kurang sampai sama sekali tidak ada. Kami kurang tahu sejauh mana pemerintah kota sudah pernah melaksanakan suatu program penyuluhan tepat dan sistematis tanpa 'melupakan pelosok-pelosok' di kota ini, namun jelas –setahu kami- di sekitar tempat tinggal kami di Dok VIII Atas tidak pernah muncul seorang pun demi penyuluhan kepada masyarakat. Tanpa kesadaran masyarakat luas, segala tindakan-tindakan pemerintah mungkin sia-sia saja, kekwatiran kami.

Jayapura, 1 Mei 2020
Theo van den Broek

³⁶ Lihat <https://www.jakartapost.com/news/2020/04/27/limited-health-facilities-leave-papua-facing-tough-covid-19-fight.html>

³⁷ Lihat <http://politik.lipi.go.id/kolom-1/kolom-papua-2/1376-kerentanan-orang-asli-papua-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19-di-tengah-endemik-dan-konflik>